

Kelangkaan Gas di Kolaka Utara Disebabkan Persoalan Distribusi

Kolaka Utara, SultraNET. | Masyarakat Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kekhawatiran akibat kelangkaan Gas LPG belakangan ini. Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Ir. Muklis Bachtiar, melakukan penelusuran informasi dan mengungkapkan bahwa kelangkaan gas tersebut disebabkan oleh persoalan distribusi.

“Pangkalan pengisian di Kolaka yang izinnya berakhir dan sedang dalam pengurusan. Akibatnya, pengisian untuk agen yang menangani distribusi di Kolaka Utara sementara dipindahkan ke Konawe sebagai tempat terdekat. Sayangnya, sekitar dua pekan yang lalu, pangkalan di Konawe mengalami kebakaran, sehingga semua distribusi gas beralih ke Kota Kendari,” jelas Ir. Muklis Bachtiar.

Namun, Ir. Muklis optimistis bahwa pangkalan di Kolaka akan berfungsi kembali paling lambat pertengahan bulan Oktober ini, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Perdagangan. “Insya Allah, malam ini akan ada pasokan gas ke Kolaka Utara,” tambahnya.

Ir. Muklis memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk membeli Gas LPG sesuai kebutuhan dan menghindari pembelian dalam jumlah yang berlebihan atau tindakan penimbunan. “Mari berlaku bijak untuk sesama warga Kolaka Utara,” ungkapnya melalui grup WhatsApp. Harapannya, dengan sikap bijak masyarakat, distribusi gas dapat berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Kominfo)

Pj. Bupati Bombana Hadiri Malam

Gemilang Perpustakaan 2023

Jakarta, SultraNET. | Pj. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, hadir memeriahkan Malam Gemilang Perpustakaan 2023 yang berlangsung di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada Rabu (11/10/2023). Acara ini dihadiri oleh sejumlah Menteri/Kepala Lembaga, para Kepala Daerah, Mitra Kerja Komisi X DPR RI, Asosiasi profesi, Pegiat Literasi Daerah, Kepala Dinas Perpustakaan Umum Daerah, Forum Perpustakaan, Sivitas Akademika, serta peserta undangan lainnya.

Malam Gemilang Perpustakaan 2023 mengusung tema “Perpustakaan Gemilang, Literasi Melaju, Indonesia Maju”. Tema ini mencerminkan semangat transformasi perpustakaan dalam membangun literasi negeri dengan inklusivitas layanan perpustakaan, guna menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, kreatif, dan inovatif.

Sebanyak 22 individu/lembaga dari 7 kategori menerima penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). Penghargaan ini menjadi apresiasi tertinggi dari pemerintah melalui Perpusnas kepada masyarakat baik perorangan, kelompok, dan lembaga yang berhasil meningkatkan literasi dan kegemaran membaca secara aktif, efektif, dan inovatif melalui pendayagunaan perpustakaan.

Kategori penerima penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023 meliputi Pejabat Publik, Masyarakat, Pegiat Literasi, Media Massa, Jurnalis, Pelestari Naskah Kuno, dan Lifetime Achievement.

Pada malam Gemilang Perpustakaan 2023, dilakukan juga pemberian penghargaan dari perlombaan dan sayembara yang diadakan oleh Perpusnas, seperti Buku Terbaik, Lomba Pustakawan Berprestasi Terbaik Nasional, Perpustakaan SMA/SMK/MA Terbaik, Lomba Best Practice Perpustakaan Perguruan Tinggi, dan Sayembara Literasi Terapan Berbasis Konten Lokal.

Muhammad Syarif Bando, Kepala Perpusnas, dalam sambutannya menyatakan bahwa pemberian apresiasi ini dilakukan sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pemerintah pusat dan daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil mendorong gerakan pembudayaan gemar membaca.

“Upaya ini dilakukan demi mencapai cita-cita dalam pembukaan UUD, yakni mencerdaskan anak bangsa,” terangnya.

Transformasi perpustakaan tidak hanya berupa aktivitas layanan digital, seperti BintangPusnas, e-Resources, Indonesia One Search (IOS), iPusnas, Khastara, hingga Pojok Baca Digital (Pocadi). Program inkubator kewirausahaan masyarakat juga diperkenalkan melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

Sumber : (**Kominfo Bombana**)

Pj. Bupati Buton Hadiri Apel Siaga Pengurangan Risiko Bencana Nasional

Kendari, SultraNET. | Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, M.Si. menghadiri secara langsung Apel Siaga dalam rangka kesiapan dan peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Tahun 2023, di Pelataran Barat Tugu Religi Sultra, Kendari Rabu pagi, 11 Oktober 2023.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara yang juga Sekjen Kemenkumham Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H yang dihadiri juga Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Rustian, S. Si., Apt., M. Kes., para kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, dan jajaran dari BNPB.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur menyampaikan, apel siaga hari ini selain kesiapsiagaan juga untuk menentukan, menjalankan, memonitoring, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis pengurangan resiko bencana (PRB). Semoga yang dirumuskan di Sulawesi Tenggara menjadi bahan Pembangunan berkelanjutan berbasis PRB.

“Saya selaku PJ tentu mendukung penuh hal-hal seperti ini untuk kemaslahatan umat, untuk pertolongan kepada Masyarakat kita sendiri kita harus siap,” ujarnya.



Apel Kesiapsiagaan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara



Apel Kesiapsiagaan Bencana Provinsi Sulawesi Tenggara

Pj. Gubernur mengatakan tujuan umum peringatan PRB tahun ini adalah untuk membangun kesadaran Bersama, membangun dialog dan mengembangkan jejaring antar pelaku PRB, serta dijadikan ajang Bersama bagi pelaku PRB seluruh Indonesia.

“Langkah yang terukur, terarah, dan tepat sasaran dalam mengantisipasi, menyikapi, menderek, merehabilitasi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial sudah saatnya berbasis pada riset dan inovasi nasional,” katanya.

Diakhir sambutannya Pj Gubernur menyampaikan selamat berurung rembuk dan bergotong royong gagasan, sebagai sumbangsi pengabdian kita secara berkelanjutan menghadirkan pengurangan risiko bencana yang menjadi basis rencana pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Puncak Peringatan Bulan PRB merupakan agenda nasional yang juga bagian dari peringatan PRB Internasional (International Day For Disaster Risk Reduction) yang diperingati setiap tanggal 13 Oktober.

Setelah mengikuti Apel Siaga Pj Bupati Buton yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Asnawi Jamluddin, S.Pd., M.Si. menghadiri pembukaan

pameran kebencanaan di Pelataran Selatan Tugu Religi Sultra yang di buka oleh Sekretaris Daerah Prov. Sultra Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.

Jadi Tuan Rumah Bulan PRB Nasional, Pj. Gub Sultra: Tingkatkan Budaya Sadar akan Bencana

Kendari, SultraNET. | Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ditunjuk menjadi tuan rumah peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) pada 10 - 15 Oktober 2023.

Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto mengatakan peringatan ini menjadi momentum untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya PRB dalam pembangunan berkelanjutan.

“Indonesia merupakan negara yang termasuk rawan bencana. Karenanya kita semua harus mampu mengenali ancamannya, pahami resiko dan tingkatkan budaya sadar bencana yang bisa terjadi kapan saja, agar dapat meminimalisir dampak sehingga pembangunan terus dapat berlanjut,” ungkap Andap saat memimpin apel siaga kesiapan peringatan bulan PRB, Rabu (11/10/2023).

Andap menjelaskan tujuan peringatan PRB tahun 2023 adalah untuk membangun kesadaran bersama, membangun dialog, mengembangkan jejaring, serta menjadi pembelajaran bersama pelaku PRB di seluruh Indonesia.

Dengan terciptanya kesadaran bersama antarpelaku PRB, Andap ingin mengembangkan kemitraan dan menghimpun masukan-masukan demi pembangunan berkelanjutan yang berbasis PRB.

Andap mengatakan pembangunan berkelanjutan berbasis PRB harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, ilmu pengetahuan dan

teknologi dapat menunjukkan kondisi riil, potensi, dan kebutuhan akan antisipasi serta rehabilitasi bencana.

“Pembangunan berbasis PRB tidak bisa didasarkan pada asumsi dan opini. Bantuan teknologi digital membantu pemetaan kondisi riil beserta analisisnya dengan lebih cepat dan terukur,” kata Andap di lapangan ex-MTQ Kendari.



Foto Bersama usai pelaksanaan Apel

Tahapan selanjutnya, ucap Andap, adalah menjadikan hasil riset sebagai dasar pengambil kebijakan anggaran dan legislasi. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Sultra telah memutuskan perubahan APBD dengan menghadirkan sistem pemerintahan daerah berbasis data presisi pada bulan September lalu.

Selain itu, Provinsi Sultra juga melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan Kementerian Hukum dan HAM untuk membentuk politik legislasi yang mendukung PRB.

“Langkah-langkah yang telah diambil Pemprov Sultra lahir dari kesadaran bahwa pembangunan berkelanjutan hanya mungkin terjadi jika benar-benar tertuang dalam keputusan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan dalam pemerintahan yang berkekuatan hukum,” ujarnya.

Apel siaga ini dihadiri kurang lebih 1.000 orang yang terdiri dari berbagai elemen, yakni TNI, Polri, Basarnas, BPBD Kabupaten/kota se-Sultra, PMI, Taruna Siaga Bencana, unsur Kesehatan, Pramuka serta berbagai kelompok Relawan Bencana (Rls)..

Pj. Ketua TP PKK Bombana Hadiri Pembukaan Lomba Senam Kreasi Nasional Piala Ibu Negara RI

Jakarta Selatan, | Pj. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, turut serta dalam acara pembukaan Lomba Senam Kreasi Nasional Piala Ibu Negara RI Tahun 2023. Acara prestisius tersebut dilangsungkan di Gelanggang Olahraga (GOR) Bulungan, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/10/2023).

Hadir juga dalam acara ini Ibu Pj. Walikota Kendari, Sitti Khomzah, SH.,M.Si, dan Anggota DPRD Kota Kendari, Hj. Rusiawati Silondae.

Ketua Umum Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM), Ibu Tri Tito Karnavian, bersama Istri Menpora Dito Ariotedjo, yang juga menjabat sebagai Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP Kemenpora RI), Nina Kirana Arya Bimo Nandito, secara resmi membuka Lomba Senam Kreasi Nasional yang memperebutkan Piala Ibu Negara RI Tahun 2023.

“Atas nama Ketua Umum OASE KIM dan Ketua PP Perwosi, Lomba Senam Kreasi Nasional yang memperebutkan Piala Ibu Negara RI Tahun 2023, secara resmi dibuka,” ucap Ibu Tri Tito Karnavian.

Ibu Tri Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (PP Perwosi), menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara OASE KIM, Kemenpora RI, dan pihak terkait lainnya.

“Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara OASE KIM, Kemenpora, dan Perwosi. Piala Ibu Negara ini diperebutkan karena beliau adalah pelindung dari Perwosi,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Ibu Tri Tito Karnavian meyakinkan bahwa para peserta telah

bersiap dan berlatih dengan baik, siap untuk menampilkan yang terbaik dalam lomba yang diikuti oleh peserta dari Aceh hingga Papua.

Lomba Senam Kreasi Nasional Piala Ibu Negara RI ini merupakan perhelatan yang telah diselenggarakan sejak tahun 2019, dimulai saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Meskipun beberapa provinsi telah mengikuti acara ini, semangatnya tetap tinggi.

“Ini luar biasa, meski kita baru saja melewati pandemi Covid-19, hampir 100% provinsi telah ikut serta. Semoga semangat ini bukan hanya karena kita berlomba, tetapi karena kita benar-benar bersemangat untuk memajukan olahraga di kalangan perempuan dan keluarga,” tegasnya.

Ibu Tri Tito Karnavian juga menyampaikan terima kasih kepada Kemenpora atas dukungannya dalam penyelenggaraan Senam Kreasi tingkat Nasional ini.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada pengurus OASE KIM Bidang III, dan juga terima kasih pada Kemenpora yang telah memberikan dukungan luar biasa. Semoga panitia ini terus solid hingga tahun depan dan kami siapkan lebih matang lagi,” pungkasnya dengan semangat (KomInfo)

Skuadron Penerbangan TNI AD Siap Dibentuk di Konawe Utara

Konawe Utara, SultraNET. | Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, bersiap menyambut pembentukan Skuadron Penerbangan TNI AD (Penerbad) dalam waktu dekat. Pada Selasa (10/10/2023), Kepala Staf TNI AD, Jenderal Dr. Dudung Abdurachman, melakukan peninjauan lokasi persiapan pembangunan skuadron di Desa Molore, Kecamatan Langgikima.

Kunjungan ini menjadi tindak lanjut dari kunjungan Bupati Konut, H. Ruksamin, ke Markas Besar TNI AD awal bulan lalu yang membahas hal serupa.

Dalam peninjauan lokasi tersebut, Dudung Abdurachman menyatakan keyakinannya bahwa pembangunan skuadron Penerbad akan selesai pada tahun 2024 mendatang.

Ia menilai bahwa lahan yang disiapkan oleh pemerintah daerah sangat layak untuk pembangunan Penerbad.

“Dilihat dari lokasi, tidak melihat kata ancaman, lokasi ini sangat strategis kalau nanti ditempatkan disini dan perekonomian bisa semakin maju,” ungkap Dudung.

Kepala Staf TNI AD menjelaskan bahwa langkah selanjutnya adalah merencanakan kebutuhan materil dan personil untuk pembentukan skuadron di wilayah Langgikima.



Penyerahan Cenderamata dari Pemkab Konawe Utara

Ia menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah menyelesaikan landasan pesawat terbang, dan setelah itu, persiapan personil dapat dilakukan.

Dudung Abdurachman meminta dukungan dari masyarakat agar pembangunan berjalan lancar.

Pembentukan skuadron Penerbad di Konawe Utara merupakan hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Ruksamin.

Bupati Ruksamin telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak terkait sebagai wujud keseriusan untuk mendukung pembentukan skuadron Penerbad di Konawe Utara.

Ia menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 180 hektar di Desa Molore untuk kepentingan pembentukan landasan pesawat terbang.

Lahan tersebut memiliki status Areal Penggunaan Lain (APL) dan berdekatan dengan fasilitas umum seperti Puskesmas dan pasar.

Dia juga melihat bahwa pembangunan skuadron akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat Konawe Utara dan Sulawesi Tenggara secara umum.

“Kami siap menunggu perintah. Kami sangat berharap bisa ditempatkan pembangunannya di Konut,” kata Bupati Ruksamin.

Lokasi pembangunan skuadron Penerbad berada di atas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) salah satu perusahaan tambang nikel.

Namun, Bupati Ruksamin menegaskan bahwa hal ini bukan kendala, karena pemilik saham dalam perusahaan tersebut adalah pemerintah daerah, provinsi, dan BUMN.

Peninjauan lokasi Penerbad di Desa Molore juga dirangkaikan dengan penyerahan cendera mata dari Pemerintah Kabupaten Konut kepada Jenderal Dudung Abdurachman, termasuk kain tenun khas Konut. (S)

Pemkab Kolaka Gelar Forum Data Gender dan Anak

Kolaka, SultraNET. | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan Forum Data Gender dan Anak di Ruang SMS Berjaya Kolaka pada Selasa (10/10).

Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana komunikasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menemukan solusi terkait pengelolaan data gender dan anak.

Kepala Dinas PPPA, Hj. Mineng, dalam sambutannya menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak, diperlukan data yang terpilah sebagai dasar wawasan.

“Data tersebut juga menjadi masukan untuk analisis gender dan pemenuhan hak anak,” ujarnya.

Hj. Mineng berharap dengan terbentuknya komunikasi antara perangkat daerah dan lintas sektoral dapat tersedia data berkualitas yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam merencanakan dan menentukan arah pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kolaka.

Forum ini menjadi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antar sektor, memastikan data yang handal siap digunakan untuk membimbing strategi pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Bunda Paud Buton Ajak Guru Paud Mendidik dengan Sabar

Pasawajo, SultraNET. | Ny. Dra. Andi Asniwati Mustari, yang dikenal sebagai Bunda Paud Kabupaten Buton, menekankan pentingnya peran ibu dan guru dalam mendidik anak-anak usia dini dengan penuh kesabaran.

Pernyataan ini disampaikan pada acara Sosialisasi dan Advokasi Pembinaan Paud Holistik Integratif (PAUD-HI) dalam Upaya Penurunan Angka Stunting untuk Mewujudkan Kembang Tumbuh Anak. Selasa 10 Oktober 2023

Acara yang berlangsung di Aula Rujab Bupati Buton tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Pokja Bunda Paud Kabupaten Buton, narasumber

dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, Wakil Ketua I Pokja Bunda Paud Kabupaten Buton, serta Bunda Paud Kecamatan se-Kabupaten Buton dan para Guru PAUD.



Peserta Sosialisasi dan Advokasi Pembinaan Paud Holistik Integratif (PAUD-HI)

Ny. Andi Asniwati Mustari menyampaikan pesannya kepada para pembina PAUD dan para Ketua PAUD untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak usia dini, yang merupakan fase awal dalam pendidikan anak sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Penting bagi guru-guru dan kepala sekolah untuk mendidik anak-anak usia dini dengan kesabaran karena PAUD adalah dunia anak-anak kecil yang memiliki dunia sendiri. Anak-anak perlu diberikan kebebasan untuk berinspirasi, karena anak yang cerdas adalah anak yang memiliki keinginan untuk mencoba hal baru,” ungkapnya.

Ny. Andi Asniwati juga mengajak para Bunda PAUD untuk menjaga kekompakan, menjalin kerja sama, dan saling bergandengan tangan dalam menyukseskan program-program PAUD di Kabupaten, hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Dia menegaskan bahwa kecerdasan anak bangsa ada di tangan semua

pihak yang terlibat dalam mendidik generasi masa depan.

“Saya berharap kepada para guru TK untuk tidak hanya membimbing tetapi juga mendidik. Kebutuhan anak di usia dini adalah dibimbing dan dididik, termasuk membiasakan disiplin sejak dini dan mendorong kebiasaan rajin membaca,” tambahnya.

Pj.Ketua TP PKK Buton ini mengakhiri pesannya dengan harapan agar komunikasi terus terjalin antar para pelaku pendidikan anak, sehingga kendala-kendala dalam mendidik generasi muda dapat diatasi bersama-sama.

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Bombana Dikukuhkan

Bombana, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Bombana secara resmi melaksanakan pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bombana Nomor 74 Tahun 2023.

Acara pengukuhan tersebut digelar di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana pada Selasa (10/10/2023) dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, Drs. Man Arfa, M.Si., mewakili Penjabat Bupati Bombana.

Dalam kesempatan ini, dilaksanakan juga Sosialisasi Program TPAKD, termasuk di dalamnya Sekolah Pasar Modal serta Pendirian Galleri Investasi oleh Bursa Efek Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat terkait pentingnya literasi dan inklusi keuangan,” ujar Sekda Man Arfa.

Industri Jasa Keuangan memegang peranan krusial dalam perekonomian suatu negara.

Sejalan dengan hal tersebut, Sekda Bombana, Man Arfa, menyampaikan bahwa

produk jasa keuangan memiliki dampak signifikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Dari tabungan, perbankan, fasilitas kredit, hingga investasi di pasar modal, semua memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan,” Bebernya



Foto Peserta saat Kegiatan Berlangsung

Man Arfa menyoroti manfaat produk jasa keuangan yang dapat meningkatkan kapitalisasi sektor keuangan dan berdampak positif pada perekonomian.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana pada tahun 2022 mencapai 5,11%, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,49%.

Dalam konteks ini, TPAKD Kabupaten Bombana dianggap memiliki peran krusial. Kolaborasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi kunci keberhasilan implementasi inovasi dan strategi baru guna mempercepat literasi dan inklusi keuangan.

Beberapa program TPAKD Kabupaten Bombana yang telah direncanakan antara lain Pertama **Program TANGKAS**: Tingkatkan Investasi Keuangan Wujudkan Bombana Surga Investasi, Kedua **Program KEJAR EMAS**: Satu Rekening Satu Pelajar, Generasi Bombana Cerdas Keuangan **Program PASTI**: Pandai Sikapi dan Lawan Rentenir.



Sekda Man Arfa (Kedua dari Kanan)

Sekda Bombana secara khusus mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara yang secara konsisten mendukung TPAKD se-Sulawesi Tenggara, termasuk TPAKD Kabupaten Bombana.

Harapannya, melalui TPAKD, dapat tercipta program-program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong percepatan akses keuangan daerah.

“Tentu dengan mempertimbangkan karakteristik sumber daya manusia dan sumber daya alam Kabupaten Bombana,” tandasnya.

Wakil Bupati Konawe Selatan Ajak Semua Pihak Berperan Aktif dalam Penurunan Stunting

Konawe Selatan, SultraNET. | Wakil Bupati Konawe Selatan, Rasyid, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Konawe Selatan untuk turut serta dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.

Imbauan ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Konawe Selatan. Rapat yang dihadiri oleh seluruh OPD, Camat, Kepala Puskesmas, dan instansi terkait lainnya ini berlangsung di Wisata Buatan Apolu Valley pada Selasa, 10 Oktober 2023.

Dalam pertemuan tersebut, mantan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara ini menekankan bahwa penurunan angka stunting memerlukan komitmen kuat dari semua pihak, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Rasyid mengajak seluruh OPD, Camat, Puskesmas, bahkan desa, untuk bersama-sama mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing.

“Pentingnya kerjasama lintas sektoral ini tidak dapat diabaikan. Kita butuh komitmen bersama untuk mengatasi masalah stunting di Kabupaten Konawe Selatan,” kata politisi dari PKS ini.



Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Konawe Selatan

Rasyid juga mengacu pada Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 474/695 tahun 2023, yang menetapkan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) Kabupaten Konawe Selatan. Ia berharap OPD yang telah diberikan amanah dapat melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas mereka.

“Sebagai bentuk komitmen unsur Pimpinan Daerah, kami memerintahkan dan mengimbau seluruh OPD serta lembaga terkait untuk turut serta dalam intervensi penurunan stunting,” tegasnya.

Rasyid menekankan bahwa instansi terkait perlu menyajikan data terpadu dan akurat tentang kasus stunting di wilayah binaannya. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk melakukan audit kasus stunting secara langsung, sebagai langkah awal dalam pencegahan dan penurunan stunting.

“Kami berharap OPD di setiap kecamatan segera menindaklanjuti tanggung jawab yang diberikan. Sanksi akan diberikan kepada OPD yang tidak mematuhi Surat Keputusan Bupati, dan Pemda akan melakukan intervensi bagi desa yang lalai dalam melaksanakan program tersebut,” tutupnya.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Konawe Selatan, sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengatasi masalah stunting di wilayah tersebut.